

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

- Ali, Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andrisman, Tri., *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang (UNPAM Press), Tangerang, 2018.
- Chazawi, Adami., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Darmodihardjo, Hyronimus Rhiti., *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Djajadiningrat, Isa Sindian., *Hukum Pajak dan Keadilan*, Eresco, Bandung, 1981.
- Djamali, R. Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Gunandi, Ismu., dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

- Hamzah, Andi., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hartanti, Evi., *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hendrastanto, dkk., *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Kelsen, Hans., *What is Justice? Justice Law and Politics in the Mirror of Science*, University of California Press, Los Angeles, 1957.
- Kenedi, John., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984.
- Marpaung, Leden., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nurdjana, I.G.M., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prakoso, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Priyatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Relika Aditomo, Bandung, 2006.
- Pudyatmoko, Y. Sri., *Pengantar hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

- Rohidi, Tjetjep Rohendi., *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- Rosikah, Chatrina Darul., dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sahetapi, J.E., *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Santoso, Topo., *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 193.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984.
- Sudarti, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Suparni, Niniek., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Surachmin dan Suhandi, *Strategi dan Teknik korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Syahrin, Alvi., Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Syamsuddin, Aziz., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Wahyuni, Fitri., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- Widowaty, Yeni., dkk, *Hukum Pidana*, Lab Hukum, Yogyakarta, 2007.

## B. Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4234, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4620, Sekretariat Negara, Jakarta.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5150, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6755, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Perihal Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/A/JA/6/2015 tentang Peningkatan Tipe

Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

### C. Jurnal Ilmiah

Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, *Lex Cimen*, Vol. IV No. 1, 2015.

Arafat, Gusti Yasser., Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.

Aritonang, Yohana E.A., July Ester, Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Aryaputra, Muhammad Iftar., Ani Triwati, & Subaidah Ratna Juita, Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19 No. 1, 2017.

Benuf, Kornelius., & Muhamad Azhar, Metodologi penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Budivaja, I.A. dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX No. 19, 2010.

Fata, Choiru., dkk, Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), *Journal of Social Community*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Fikri, Rahul Ardian., Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Fios, Frederikus., Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2012.

Hiola, Rommy Y., Pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Gorontalo, *Jurnal Tociung*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 9 No. 1, 2021.

Kania, Dede., Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.

- Manullang, E. Fernando M., Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Mezak, Meray Hendrik., Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Vol. 5 No. 3, 2006.
- Mihartika, Rini., & Nurhafifah, Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Peradilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Noorsanti, Inggal Ayu., Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Nurhardianto, Fajar., Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11 No. 1, 2015.
- Pahlevi, Farida Sekti., Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ramiyanto, Penghapusan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Criminal Penalty Abolition on Corruption Case in Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 3, 2014.
- Rijali, Ahmad., Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.
- Sulastri, Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu sebagai Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional, *Wasaka Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Waluyo, Bambang., Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., Menggagas Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. I No 3, 2006.

#### **D. Media Online**

- Ferdiansyah, Randy., Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

Hayati, Rina., 2020, Pengertian Data Sekunder, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya, <https://penelitianilmiahlm.com/data-sekunder/>, diakses 15 September 2023.

Pakpahan, Rudy Hendra., Efektivitas Pidana Denda, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses tanggal 20 Desember 2023.

Populix, 2021, Pengertian Data Primer dan Perbedaannya Dengan Data Skunder, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses 15 September 2023.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 24 Mei 2022, Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini, Pusat Edukasi Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses 8 Januari 2024.

Nazra, Wahyu Apriliansyah., Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum, Padang, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, hlm. 5, <https://osf.io/7cufd/download>, diakses 28 Maret 2024.

